

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah pandemi covid-19 sangat mempengaruhi tatanan kehidupan manusia. Tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. Wabah ini merusak banyak sektor yang sebelumnya masih berjalan dengan baik. Perekonomian adalah salah satu sektor yang sangat terganggu kestabilannya. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga sulit untuk memperoleh pundi-pundi uang karena harus dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Hal ini tampak dari ditutupnya destinasi pariwisata (ditutupnya akses masuk wisatawan dari luar negeri), berhentinya para pelaku UMKM, transportasi, dan industri yang terpaksa harus diberhentikan. Wabah pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan pertumbuhan *year-on-year*, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53 persen. Rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada Triwulan I-2020 juga turun drastis hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9 persen bila dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antarnegara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB (Nufransa Wira Sakti, 2020).

Masyarakat kelas menengah ke bawah adalah kelas yang paling riskan mengalami dampak wabah pandemi ini. Selain kehilangan pekerjaan, masyarakat yang memilih usaha kecil, menengah akan sangat sulit mempertahankan usahanya. Tidak dapat dipungkiri, wabah pandemi berujung pada

tingkakemiskinan yang semakin meningkat. Asep, Ridho, & Daniel dalam Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia (2020) menyatakan :

“Dampak paling ringan Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi ke kisaran angka 1% sampai 4%. Kami menemukan bahwa dampak paling ringan Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2 % pada September 2019 ke 9,7% pada akhir 2020. Hal ini berarti bahwa akan ada 1,3 juta orang yang jatuh miskin. Menurut proyeksi terburuk kami, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4%, menyiratkan bahwa 8,5 juta orang akan menjadi miskin.”

Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menghadapi dampak yang diakibatkan wabah pandemi Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat secara langsung. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah memberikan bantuan sosial dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako, pemotongan tarif uang listrik, dan bantuan lain yang sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa Bantuan Sosial (Bansos) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. Bentuk bantuan dapat berupa uang atau barang, tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko sosial. Adapun bantuan sosial yang diberikan melalui program jaring pengaman sosial (JPS) adalah bantuan program sembako,

program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD).

Dikutip dari website resmi Sekretariat Republik Indonesia, Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan berupa: Satu, Pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga dengan total anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun. Kedua, Pemberian kartu sembako kepada 20 juta penerima yang mana setiap orang menerima bantuan sebesar Rp.200.000 perbulan. Ketiga, penerbitan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp.600.000 selama 4 bulan. Keempat, pemberian diskon tarif listrik untuk 900 VA dan pembebasan tarif listrik 450 VA, Kelima, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3 (bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat di DKI Jakarta, bantuan sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan sosial langsung tunai (BST) untuk masyarakat di luar Jabodabek) yang mana jumlah bantuan tersebut sama, senilai Rp.600.000 dan diberikan selama 3 bulan dan akan diperpanjang. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama 3 bulan sebesar Rp.600.000 tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan bantuan-bantuan lainnya.

Penyaluran bantuan sosial COVID-19 adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keberadaan masyarakatnya dalam menghadapi kerentanan sosial. Negara memberikan perlindungan terhadap warganya dan berusaha menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal

5 ayat (3) yang menyatakan “*setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhusunnya*”.

Kecamatan Siempat Nempu adalah salah satu kecamatan yang mendapat bantuan sosial Covid-19. Kecamatan ini terbagi atas 13 desa yang masing-masing memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kecamatan (dapat dilihat pada peta di bawah). Mayoritas penduduk di Kecamatan Siempat Nempu bermata pencaharian sebagai petani. Dampak wabah pandemi turut dirasakan warga sekitar karena harga dan permintaan untuk hasil panen turut menurun. Hal ini diakibatkan pembatasan kegiatan atau tertutupnya beberapa pintu masuk pengiriman barang ke beberapa kota yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu banyak penduduk yang kembali dari perantauan karena kehilangan lapangan pekerjaan menambah tanggungan keluarga.

Penyaluran bantuan sosial COVID-19 dimulai sejak April 2020 dengan durasi tiga bulan hingga bulan Juni. Kemudian dimulai lagi Juli terhitung tiga bulan ke depannya. Penyaluran bantuan sosial ini masih berlangsung sampai dengan tahun 2021.



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Siempat Nempu

Desa Bunturaja adalah desa yang wilayahnya berada di pusat ibu kota kecamatan dan sangat dekat jaraknya dengan Kantor Kecamatan Siempat Nempu. Di sisi lain, Desa Soban sebagai salah satu desa yang memiliki jarak yang paling jauh dari kantor kecamatan, harus menempuh jarak 15 km ke pusat kecamatan. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah kecamatan untuk menyalurkan bantuan sosial. Bantuan sosial akan didistribusikan ke desa-desa melalui kantor kecamatan. Hal ini menjadi keuntungan bagi Desa Bunturaja karena dengan mudah dalam menerima informasi dan memperoleh bantuan sosial COVID-19. Misalnya beberapa bantuan berupa uang tunai/bantuan sosial tunai harus diambil ke kantor pos yang berada di wilayah Desa Bunturaja. Sedangkan penduduk Desa Soban harus menerima informasi terlebih dahulu dari pemerintah desa sebagai penanggung jawab penyaluran bantuan sosial di tingkat desa. Akibatnya terjadi ketidaksamaan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan di Desa Soban dengan Desa Bunturaja dan desa lainnya. Selain itu, akses jalan dari Desa

Soban menuju pusat kecamatan dapat dikatakan dalam keadaan tidak baik atau rusak (tampak dari jalan yang sudah berlobang-lobang).

Pemerintah Desa Bunturaja sebagai pusat wilayah kecamatan memiliki banyak keuntungan dalam menyalurkan bantuan sosial COVID-19. Selain lebih optimal dari segi jarak tempuh, keberadaan kantor kecamatan sekaligus menjadi pengawas dalam melakukan pendataan dan penyaluran bantuan. Sedangkan Desa Soban yang memiliki jarak yang cukup jauh dengan Kantor Kecamatan terkesan luput dari pengawasan pihak kecamatan. Keterbatasan informasi dan sosialisasi yang diterima masyarakat seperti mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menerima bantuan, dan kelompok yang mendapat giliran menerima bantuan perlu menjadi perhatian. Hal ini menyangkut kualitas dan efektivitas penyaluran bantuan, sehingga nilai nominal atau jumlah bantuan dari pusat terjaga keutuhannya hingga ke desa-desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian terkait penyaluran bantuan sosial dengan judul “Implementasi Program Bantuan Sosial COVID-19 di Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat dari permasalahan diatas yaitu :

1. Bagaimana implementasi program bantuan sosial selama pandemi Covid-19 di Desa Soban dan Desa Bunturaja?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan sosial Covid-19 di Desa Soban dan Desa Bunturaja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penulis untuk melakukan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi program bantuan sosial Covid-19 di Desa Soban dan Desa Bunturaja.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan sosial Covid-19 di Desa Soban dan Desa Bunturaja.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan wawasan yang lebih luas tentang implementasi program bantuan sosial Covid-19.

b. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah terkait implementasi program bantuan sosial Covid-19 di kalangan masyarakat.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pustakawan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi

Istilah implementasi merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Harold Laswell sebagai ilmuwan pertama yang mengembangkan studi tentang kebijakan publik. Laswell menggagas suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses (*policy process approach*). Laswell melihat bahwasannya para ilmuwan perlu mendapat pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu: *agenda-setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi. Implementasi merupakan salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:18), pokok bahasan studi implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti: (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah; (ii) mengapa suatu kebijakan yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah; (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Udoji dalam Agustino (2020:147) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekadar berupa

impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

Menurut Rafi'i, Indarajaya, dan Hikmah (2020:11), implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik.

Menurut Widodo (2010:88), implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Pemahaman terhadap berbagai fenomena implementasi dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tersebut. Pemetaan yang dimaksudkan adalah apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Peta tentang faktor-faktor tersebut terakumulasi menjadi model implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana yaitu sebagai hubungan sebab-akibat antara keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut.

Aneta (2010:55) berpendapat bahwasannya: “ Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik.

Pemahaman mengenai defenisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri sesuai dengan dekadanya. Pressman dan Wildavsky dua sarjana yang masih terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik-administrasi, memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk mengetahui janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Pemaknaan terhadap studi implementasi terus mengalami perkembangan. Bagi para peneliti generasi ke III, implementasi dipahami secara lebih kompleks sebagai sebuah transaksi (pertukaran) berbagai sumber daya yang melibatkan banyak *stakeholder*. Purwanto dan Sulistyasti (2012:21) berpendapat bahwa:

“Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy out put* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan”.

Menurut Purwanto dan Sulistyasti (2012:22-23), upaya untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy process*). Pendekatan

kedua, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai suatu bidang kajian (field of study).

Implementasi sebagai proses perumusan kebijakan terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah agenda setting suatu masalah publik yang dianggap mendapat perhatian publik yang luas yang menuntut adanya tindakan dari pihak pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut melalui suatu kebijakan. Pada tahap agenda setting diperlukan koalisi (dukungan) dari berbagai elemen atau kekuatan politik sehingga ada kompetisi untuk mendapatkan perhatian publik yang luas. Tahap selanjutnya adalah formulasi kebijakan yang merupakan proses penyusunan rencana serta metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam agenda setting. Tahap selanjutnya adalah implementasi. Tahap keempat dan kelima adalah evaluasi kebijakan dan penyempurnaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan akan dihentikan apabila tujuan yang diinginkan sudah berhasil dicapai.

Implementasi sebagai studi memiliki berbagai elemen penting, yaitu: *subject matter (ontologi)*, cara memahami obyek yang dipelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi). Tahapan-tahapan ilmiah implementasi sebagai suatu studi tersebut adalah:

- a) Menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji.
- b) Merumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) yang hendak diteliti.
- c) Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian.
- d) Menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data
- e) Mengolah dan menganalisis data

f) Rekomendasi kebijakan.

Menurut Widodo (2018:88), implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sebuah kebijakan, implementasi suatu kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yakni, tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Widodo (2018:90-94) menjabarkan lebih operasional tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategy policy*) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*).

Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekadar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholders*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran

(kelompok sasaran) kebijakan. Kebijakan itu perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.

2. Tahap Pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

a. Pelaksana Kebijakan (*Policy Implementor*)

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekadar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b. Standar Operasioal Pelayanan (*Standard Operating Procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *standard operating procedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, dan tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain. Demikian pula macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan,

tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

f. Tahap Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Edwards menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni “ *Communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure*”. Keempat faktor implementasi tersebut dianggap memiliki peran krusial dalam menjalankan implementasi kebijakan karena saling berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan. Apabila salah satu faktor tidak terpenuhi maka akan berdampak terhadap lemahnya implementasi kebijakan publik.

Rafi'i, Indarajaya, dan Hikmah (2020:12) melihat bahwa model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III berperan penting dalam mencapai keberhasilan implementasi. Adapun keempat variabel tersebut adalah sebagai berikut:

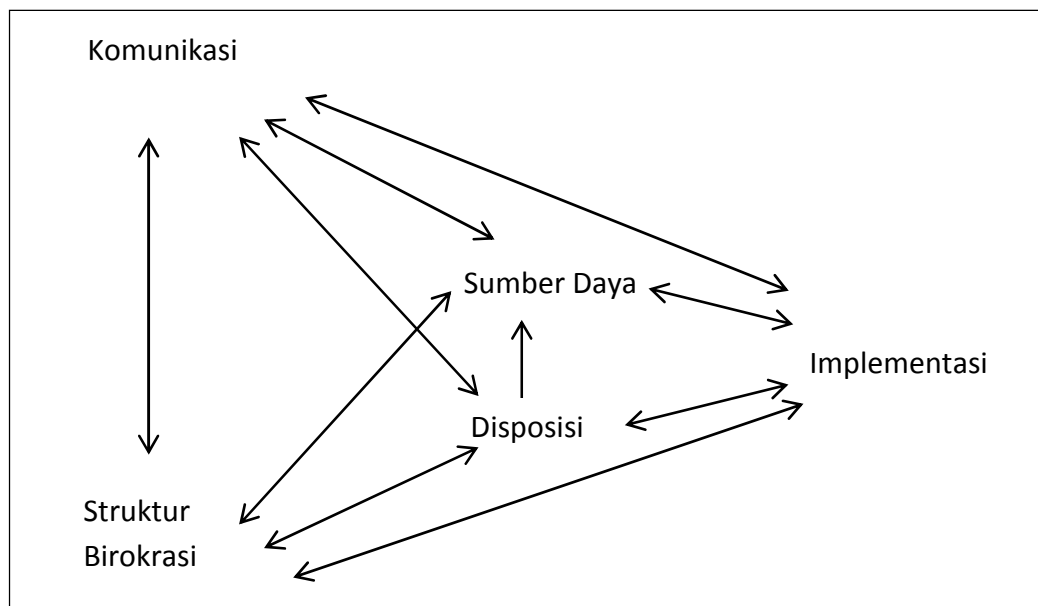
- 1) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target

group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

- 2) Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas program atau kebijakan.
- 3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter penting yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.
- 4) Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Menurut George Edward dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain, yakni: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.



Gambar 2.1.3.1 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III

a. **Komunikasi**

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi dimaksudkan agar para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Edward III dalam Widodo (2010:97) memaparkan beberapa dimensi yang dimiliki kebijakan, yaitu:

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi Kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Faktor komunikasi erat kaitannya dengan kemampuan sosialisasi para implemmentor atau pelaksana kebijakan. Hasibuan, Yusnadi, dan Saut Purba (2016:62) berpendapat bahwa:

“Sosialisasi merupakan salah satu sarana yang bisa dipakai untuk melakukan proses komunikasi karena informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kelompok sasaran kebijakan (*target group*), sehingga pelaku kebijakan dapat

mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri”.

b. Sumberdaya

Menurut Edward III dalam Agustino (2014:151-152), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Maka indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya sangat mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf/pegawai dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan adanya persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) di dalam implementasi kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua hal bentuk, yaitu: Pertama, informasi yang dapat berhubungan dengan cara melaksanakan sebuah kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Maka kewenangan merupakan otoritas atau legilitas bagi para semua pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat juga menggagalkan proses implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas sebuah kewenangan. Di salah satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan

menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana dengan kepentingan sendiri atau kelompoknya.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Edward III melihat sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusi, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia yang mampu secara kualitas dan kuantitas. Kualitas yang dimaksud adalah keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia dalam mendukung terwujudnya seluruh kelompok sasaran.

2. Anggaran

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas program atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sangat sulit untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif.

Edward III dalam Widodo (2010:101) berpendapat bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal,

keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104), disposisi adalah kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Edward dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa: “jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai keamanan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”.

Edward III dalam Agustino (2016:159-160) menjelaskan beberapa aspek yang mempengaruhi disposisi dalam implementasi kebijakan, yakni:

a. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward dalam Widodo (2010:106) berpendapat bahwa “implementasi bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Edward III dalam Widodo (2010) juga menjelaskan bahwa: “demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”.

Edward III dalam Agustino (2016:141) mengungkapkan ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yakni:

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Tercapainya tujuan dan sasaran adalah bentuk implementasi yang sudah terlaksana dengan baik. Maka dari itu, faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas sangat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Apabila para pelaksana belum mampu menjalin komunikasi yang baik, mempersiapkan sumber daya yang memadai, memiliki staf yang ahli di bidang masing-masing, dan tidak mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ada, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik.

2.1.4 Teori Kemiskinan

Menurut Siagian (2012:3), kemiskinan sebagai suatu proses merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Konsep daya dukung dalam kaitannya dengan kehidupan manusia menunjukkan bahwa kondisi kehidupan yang dihadapi dan sedang dijalani manusia merupakan produk dari proses dimana dalam proses itu terlibat berbagai unsur.

Sedangkan sebagai kondisi, Siagian (2012:2-3) berpedapat bahwa kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau kelompok orang hidup di

bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mencher dalam Siagian (2012:5) mengemukakan kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak.

Pearce dalam Siagian (2012:7) mengemukakan, kemiskinan merupakan produk dari interaksi teknologi, sumber daya alam dan modal, dengan sumber daya manusia serta kelembagaan. Dalam hal ini kemiskinan itu merupakan suatu produk dari proses interaksi yang tidak seimbang atau interaksi yang bersifat timoang diantara berbagai elemen yang ada dalam suatu ekosistem, sehingga pada gilirannya berdampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Menurut Septiadi dan Nursan (2020:2), kemiskinan memiliki dampak pada penurunan kualitas hidup, menghambat terciptanya sumber daya manusia unggul, menciptakan beban sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kriminalitas, dan menurunkan ketertiban umum. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan konsumsi untuk jenis makanan dan non-makanan.

Prawoto (2009:60) berpendapat bahwa pada dasarnya kemiskinan dapat didefinisikan menjadi tiga pengertian kemiskinan antara lain: kemiskinan absolut, kemiskinan non relatif, dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Menurut Solikaturun, Supono, dan Masruroh (2014:75), kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Secara umum konsep kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai akibat langsung dari pendapatan, baik dalam nilai uang maupun pendapatan yang tidak dinilai dengan uang seperti keamanan, kebebasan, maupun kesempatan ekonomi dan lain-lain. Castells dalam Siagian mengemukakan:

“Kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standard kebutuhan hidup minimum agar manusia dapat bertahan hidup. Adapun standard kebutuhan minimum dimaksud pada umumnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan. Cara ini ditempuh karena kebutuhan pokok pangan inilah yang mengakibatkan sekaligus merupakan sumber dari manusia untuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas hidup dengan sehat. Oleh karena itu kajian hidup sehat sangat tepat jika didasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi”

2.1.2 Ciri-ciri kemiskinan

Siagian (2012:20-24) mengemukakan ada lima ciri-ciri kemiskinan, yakni:

1. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup luas, modal yang memadai, ataupun keterampilan yang memadai untuk melakukan suatu aktivitas ekonomi sesuai dengan mata pencahariannya.

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan atau peluang untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Sebagai contoh, keluarga petani dengan perolehan pendapatan yang hanya cukup untuk konsumsi. Mereka tidak berpeluang untuk memperoleh tanah garapan, benih, ataupun pupuk sebagai faktor produksi.
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, misalnya tidak tamat SD, atau hanya tamat SD. Kondisi seperti ini akan berpengaruh terhadap wawasan mereka. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa waktu mereka pada umumnya habis tersita semata-mata hanya untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar atau meningkatkan keterampilan. Mereka yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung memiliki anak dalam jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang tinggi.
4. Pada umumnya mereka masuk ke dalam kelompok penduduk dengan kategori setengah menganggur. Pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah mengakibatkan akses masyarakat miskin ke dalam berbagai sektor formal bagaikan tertutup rapat. Akibatnya mereka terpaksa memasuki sektor-sektor informal. Bahkan pada umumnya mereka bekerja sarabutan maupun musiman. Jika dikaji secara totalitas, mereka sesungguhnya bukan bekerja sepenuhnya, bahkan mereka justru lebih sering tidak bekerja. Kondisi yang demikian mengakibatkan

mereka memiliki produktivitas yang rendah, dan seterusnya mengakibatkan mereka memperoleh pendapatan yang rendah pula.

5. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda, tetapi tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai. Sementara itu kota tidak siap menampung gerak urbanisasi dari desa yang semakin deras. Artinya, laju investasi di perkotaan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan tenaga kerja sebagai akibat langsung dari derasnya arus urbanisasi.

Identik dengan ciri-ciri kemiskinan sebagaimana telah dikemukakan, Salim dalam Siagian (2012:23-24) mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, yaitu:

1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor-faktor produksi sendiri.
2. Penduduk miskin pada umumnya juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi jika dengan kekuatan sendiri.
3. Penduduk miskin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
4. Banyak diantara penduduk miskin tidak mempunyai fasilitas sehingga hidupnya tidak layak.
5. Di antara penduduk miskin terdapat kelompok dengan usia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Pemahaman konsep kemiskinan perlu diperdalam dan disempurnakan melalui kajian tentang definisi kemiskinan. Definisi merupakan batasan arti. Menurut Siagian (2012:25), perumusan definisi kemiskinan memang tidak akan

menghasilkan makna kemiskinan generalis, tetapi lebih faktual, karena biasanya penekanan dan pemilihan aspek kajian yang dilakukan dipengaruhi oleh fakta, pengalaman, sejarah, maupun latar belakang pihak yang merumuskan definisi tersebut maupun lokasi kemiskinan yang dikaji.

Berikut ini adalah beberapa definisi kemiskinan:

1. World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia baik fisik atau sosial sebagai akibat tidak tercapainya kehidupan yang layak karena penghasilannya tidak mencapai 1,00 dolar AS perhari.\
2. Jika ditinjau dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok, maka kemiskinan adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar yang disebabkan kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi standar hidup yang layak.
3. Jika ditinjau dari pendapatan, maka kemiskinan adalah kondisi kurangnya pendapatan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
4. Jika ditinjau dari kesempatan, maka kemiskinan merupakan dampak dari ketidaksamaan kesempatan memperoleh dan mengakumulasikan basis-basis kekuatan sosial, seperti:
 - a. Keterampilan yang memadai.

- b. Informasi dan berbagai pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan hidup.
 - c. Jaringan-jaringan sosial
 - d. Organisasi-organisasi sosial dan politik.
 - e. Sumber-sumber modal yang diperlukan dalam upaya peningkatan pengembangan kehidupan.
5. Jika ditinjau dari keadaan yang dialami, kemiskinan merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan:
- a. Kelaparan atau setidaknya kekurangan makanan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (gizi).
 - b. Pakaian dan perumahan yang tidak memadai.
 - c. Tingkat pendidikan yang rendah.
 - d. Memiliki sangat sedikit kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat dasar.
6. Jika ditinjau dari penguasaan sumber-sumber, kemiskinan merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh penyebaran yang tidak merata dari sumber-sumber, termasuk didalamnya pendapatan.
7. Kemiskinan merupakan suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, meliputi:
- a. Kebutuhan fisik dasar (*basic fisical needs*), meliputi makanan dan gizi, perlindungan atau perumahan, dan kesehatan.

- b. Kebutuhan budaya dasar (*basic cultural needs*), meliputi pendidikan, penggunaan waktu luang dalam bentuk rekreasi dan jaminan sosial.
- c. Pendapatan yang surplus atau melebihi takarannya.

2.1.3 Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “Catera” yang berarti Payung. Menurut Fahrudin (2012:8-9), kesejahteraan yang terkandung dalam arti “Cartera” adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin.

Kesejahteraan merupakan upaya pertolongan yang diyakini sudah ada sejak lama untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kesejahteraan muncul sebagai hak yang harus terpenuhi oleh manusia sebagai makhluk sosial. kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Untuk memperoleh kesejahteraan diperlukan pelayanan-pelayanan sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesejahteraan memiliki empat arti keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam kesehatan dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, dimana seorang individu dikatakan sejahtera apabila segala kebutuhannya terkait benda primer maupun sekunder sudah dapat dipenuhi.

Friedlander dalam Fahrudin (2012:9) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Menurut Alim (2019:16), kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang mempunyai suatu perhatian utama dan langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup penyediaan pertolongan dan proses yang secara langsung berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia, daya beli dan perbaikan kualitas hidup.

Lapananda (2013:23-24) mengemukakan: “Pemberian bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat dalam bingkai risiko sosial dan bukan untuk membiayai kegiatan anggota atau kelompok masyarakat yang tidak berkaitan dengan melindungi anggota/kelompok masyarakat dari kemungkinan risiko sosial dan/atau bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari risiko sosial”.

Menurut Fahrudin (2012:40), kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil ataupun spiritual, yaitu suatu tata bagaimana orang hidup dan bagaimana menghidup diri dan keluarganya, yang berarti suatu keteraturan atau suatu order. Fahrudin (2012:10) juga menjelaskan ada dua tujuan kesejahteraan sosial, yakni:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10-12) terdapat tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

- a) Pemeliharaan sistem
 Pemerliharan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.
- b) Pengawasan sistem
 Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan diri sendiri (*self-control*) dengan jalan menghilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya. Di samping itu, dapat pula dipergunakan saluran-saluran dan batasan-batasan hukum guna meningkatkan pengawasan eksternal (*external control*) terhadap penyimpangan tingkah laku.
- c) Perubahan sistem
 Sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap pasrtisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan;pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Wabah pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau belum memiliki pekerjaan yang menetap karena sewaktu-waktu mereka dapat kehilangan pekerjaannya. Akibat dari wabah pandemi banyak perusahaan yang tutup dan secara terpaksa memberhentikan para pekerjanya. Dalam kondisi seperti ini, tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Adi (2013:94-95) mengemukakan bahwa :

“Ketika mereka mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), menderita cacat, atau mengalami gangguan lainnya yang mengancam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, maka mereka seringkali memerlukan bantuan untuk menunjang ekonomi keluarga tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan sistem jaminan sosial yang dapat menangani masalah-masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut”.

Reid dalam Fahrudin (2012:39) berpendapat bahwa :“Kesejahteraan sosial barangkali yang terbaik dipahami sebagai suatu ide atau gambaran, yaitu gambaran tentang suatu masyarakat yang baik, yang memberikan kesempatan-kesempatan untuk kerja dan arti manusia, memberikan keamanan yang layak dari kekurangan atau kemiskinan dan serangan, meningkatkan keadilan dan evaluasi berdasarkan jasa individu, dan yang secara ekonomi produktif dan stabil”.

Kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan pelayanan sosial. Pelayanan adalah implementasi dari kebijakan yang diambil oleh pelaksana negara guna mencapai tujuan kesejahteraan. Menurut Sainsbury dalam Fahrudin (2012:50) menyatakan bahwa:

“Dalam arti yang sangat luas pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah tertentu khususnya kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya”.

Pemberian pelayanan sosial didasarkan atas kebutuhan, sehingga walaupun orang tidak mampu membayar, tetap akan diberi pelayanan yang dibutuhkannya (Fahrudin, 2012:52). Hal ini sejalan dengan tugas negara yang tertuang dalam UUD 1945 yang mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang layak yang diatur dengan undang-undang.

Pelayanan sosial merupakan wujud dari negara kesejahteraan. Midgley dalam Fahrudin (2012:104) mengatakan bahwa :

“konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahnya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya. Negara dapat dinilai berdasarkan seberapa banyak pelayanan-pelayanan sosial yang disediakan untuk warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*policy social*) yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama dalam memberikan perlindungan sosial (*social protection*) berupa jaminan sosial (bantuan sosial)”.

Friedlander & Apte dalam Fahrudin (2012:12-13) mengatakan bahwa ada 4 fungsi kesejahteraan sosial dalam menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan sosio-ekonomi. Fungsi ini berkaitan dengan arah kebijakan pelaksanaan program bantuan sosial Covid-19. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang (*Supportive*)

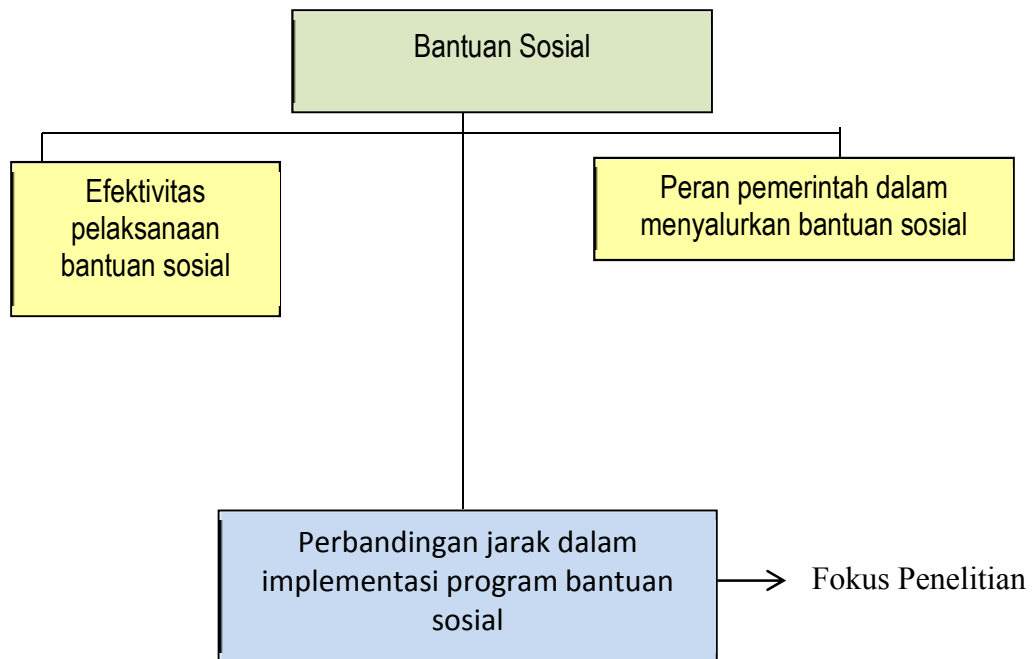
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Pemerintah mengambil peran penting dalam menjamin keberadaan masyarakatnya di masa pandemi Covid-19.

Pemerintah sebagai penyelenggara utama layanan sosial atau usaha kesejahteraan sosial terhadap masyarakat adalah penentu terwujudnya negara

kesejahteraan. Deacon dalam Adi (2015:248) menjelaskan negara kesejahteraan sebagai:

“Suatu masyarakat dimana pemerintahnya bertanggung jawab menjamin bahwa setiap warganya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin yang ia mampu raih (untuk memenuhi kebutuhan hidupnya) pada bidang perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan layanan sosial personal”.

2.2 Penelitian terdahulu



Dalam mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang disusun oleh peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Agung Aldino Putra Dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat Kota

Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama) Pada Tahun 2019 Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang diperlukan dalam menilai apakah pelaksanaan program bantuan sosial sudah berjalan dengan efektif atau tidak. Adapun indikator tersebut adalah pencapaian tujuan (waktu pelaksanaan dan sasaran), integrasi (sosialisasi), dan adaptasi atau pemanfaatan sumber daya manusia dalam melakukan pemantauan. Dalam hasil penelitiannya, Agung melihat bahwa adanya keterlambatan anggaran dari pihak pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, administrasi pelayanan yang dilakukan pun masih berbelit-belit sehingga waktu pelaksanaan menjadi tidak efektif. Dari segi pemilihan calon penerima bantuan, masyarakat mengeluh karena adanya rekomendasi untuk mendapatkan bantuan dari otoritas kekuasaan tinggi di Kota Palu. Pemerintah kabupaten tidak melakukan integrasi atau sosialisasi tentang adanya program bantuan ini. Untuk aspek adaptasi berjalan dengan baik karena pemerintah kabupaten melakukan bimtek pada dinas sosial sebelum melaksanakan penyaluran bantuan.

2. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nugrahana Fitria Nurhayana, Hadi Ferdiansyah Dengan judul Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 melalui Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluatif berdasarkan data dan studi literatur yang pada kesimpulannya menjelaskan tentang bagaimana pemerintah dalam memperoleh data yang akurat penduduk miskin melalui Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS), bagaimana partisipasi masyarakat ambil peran dalam membantu pendataan, dan kebijakan pelabelan rumah tangga miskin penerima bantuan sosial yang dilakukan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada persepsi positif dan negatif dari masyarakat mengenai pemberian label ini. Dari sisi positif, masyarakat merasa pemberian bantuan menjadi tepat sasaran sedangkan dari sisi negatif masyarakat merasa malu karena rumah mereka diberi label penduduk miskin. Namun tetap saja ada beberapa masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap terima rumahnya diberi label miskin. Secara keseluruhan, pemberian label ini memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan.

3. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Regina Wowiling Dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan melalui Metode penelitian kualitatif yang pada kesimpulannya menjelaskan peran yang dilakukan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan. Dalam hasil penelitian Regina melihat bahwa penyaluran BLT tidak berjalan dengan baik karena masih banyak penerima bantuan adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi. Peran yang diambil pemerintah desa adalah menjalani aturan hukum mengenai kriteria penerima bantuan dan bagaimana proses tahapan yang ada dalam menyalurkan bantuan sosial tersebut. Selain itu, pemerintah desa juga mengambil langkah konsensus orientasi yaitu dengan melaksanakan musyawarah atau kesepakatan bersama mengenai penerima bantuan langsung tunai tersebut.

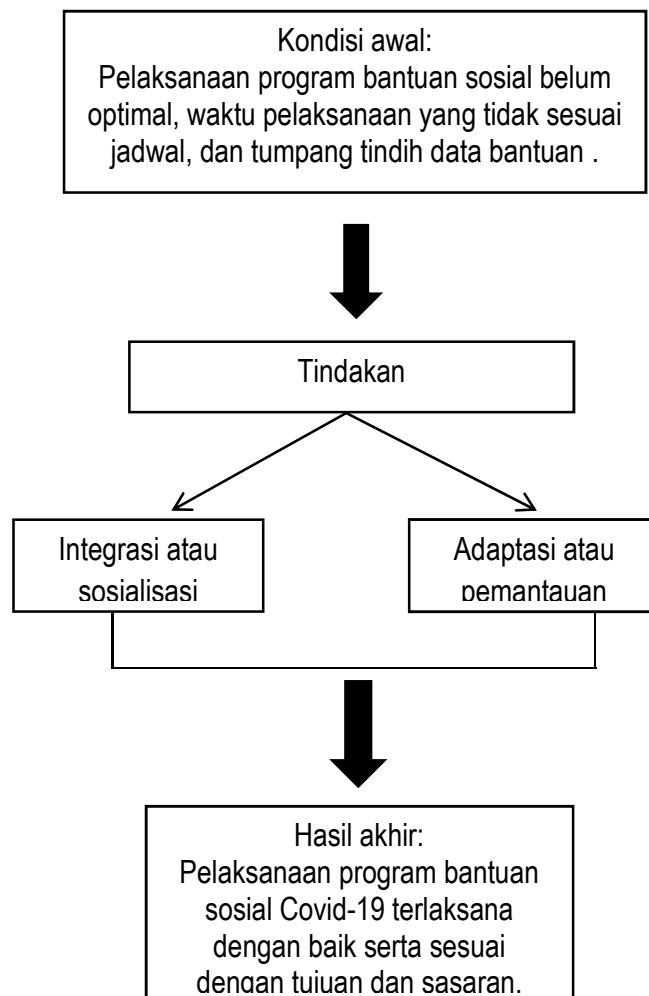
Pemerintah juga dituntut untuk efisien dan efektif dalam menyalurkan bantuan langsung tunai ini yaitu dengan melakukan pendataan, pengawasan, dan penyaluran secara langsung kepada masyarakat.

4. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fatkhul Khoiriyah, Liana Oktavia, Ni'Matus Zakiyah, dan Muhammad Afthon Ilham Huda Dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kantor Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 2020 melalui Metode deskriptif kualitatif yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial BLT-Dana Desa dan BST belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada masyarakat penerima bantuan yang mencukupi secara ekonomi. Dalam penelitiannya, Fatkhul dkk. mengukur keefektifan penyaluran bantuan berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Indikator ini sama halnya dengan indikator yang digunakan Agung Aldino Putra dalam penelitiannya dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama).
5. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Melati, Zulkarnaini Dengan judul Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian Pada Tahun 2020 melalui Metode penelitian kualitatif yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa keluarga penerima manfaat masih tumpang tindih berdasarkan data yang sudah ada di DTKS. Hal ini menghambat proses penyaluran BST karena terdapat NIK yang tidak valid. Indikator penilaian tingkat efektivitas program bantuan

sosial tunai sama dengan indikator yang digunakan Agung Aldino Putra dalam penelitiannya yakni ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka peneliti mengambil fokus pada implementasi program bantuan sosial Covid-19 di desa yang memiliki jarak paling jauh dari pusat kecamatan dan desa yang paling dekat ke pusat kecamatan.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.3.1 Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir, penulis memaparkan kondisi awal di lapangan menyangkut masalah yang akan diteliti. Gambaran kondisi ini didapatkan berdasarkan data-data yang dikumpulkan penulis. Di dalam kondisi awal, peneliti menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan tidak sesuai atau menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini didukung dengan teori-teori yang menunjukkan bahwasannya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Kondisi awal yang didapatkan peneliti adalah penyaluran bantuan sosial belum optimal karena data penerima bantuan sosial masih tumpang tindih, dan waktu pelaksanaan yang belum sesuai.

Di dalam tahap tindakan, peneliti akan mengkaji atau menggali informasi baik dari pemerintah, masyarakat mengenai tindakan apa yang diambil untuk memecahkan masalah tersebut atau kebijakan apa yang dilakukan. Bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi, pemanfaatan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, pelaksanaan tugas sesuai dengan struktur birokrasi, komunikasi/koordinasi antar pelaksana kebijakan, sarana yang tersedia guna mendukung pelaksanaan program, dan kesungguhan para pelaksana dalam menjalankan program. Peneliti akan melakukan wawancara dan mengumpulkan data dari lapangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan sosial tersebut yang dipercaya adalah solusi atas kondisi awal yang sedang terjadi.

Tujuan akhir atau hasil yang diharapkan dari tindakan yang sudah dilakukan adalah tercapainya pelaksanaan bantuan sosial yang lebih optimal, serta tujuan dan sasaran tercapai. Hasil akhir adalah jawaban dari solusi yang diambil oleh

pihak pemerintah dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Hasil akhir merupakan jawaban atas ketidaksesuaian yang terjadi di kondisi awal.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Metode penelitian merupakan instrumen penting dalam melaksanakan suatu penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penulis harus menentukan metode apa yang digunakan untuk menganalisa masalah yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran bantuan sosial COVID-19 menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moelong (2017:5) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.”

Adapun data pada penelitian kualitatif berbentuk kata-kata, gambar, dan tidak berupa angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penyaluran bantuan sosial COVID-19 di Desa Soban dan Desa Bunturaja Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Desa Soban dan Desa Bunturaja Kecamatan Siempat

Nempu Kabupaten Dairi. Penulis akan melakukan penelitian pada bulan Juli dengan jangka waktu penelitian kurang lebih satu bulan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Bungin (2007:155) “ Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan,dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Hal ini ditujukan untuk mencari jawaban hipotesis”.

Dalam melakukan wawancara, pewawancara harus mampu menjalin interaksi yang baik dengan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007:111). Peneliti harus membangun hubungan yang baik sehingga informan merasa nyaman dan bebas dalam memberikan informasi yang sebenarnya. Peneliti terlebih dahulu menyusun pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan pada saat melakukan wawancara. Hal ini bertujuan untuk membangun wawancara yang terarah dan maksud dari pembicaraan dapat tercapai.

Metode wawancara peneliti digunakan untuk menggali data dan informasi terkait penyaluran bantuan sosial Covid-19 di Kecamatan Siempat Nempu. Adapun informannya antara lain :

- a. Kepala Desa (Informan kunci), untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Covid-19 di Desa Bunturaja dan Desa Soban.
- b. Masyarakat (Informan tambahan) sebagai penerima bantuan sosial Covid-19.

2. Dokumentasi

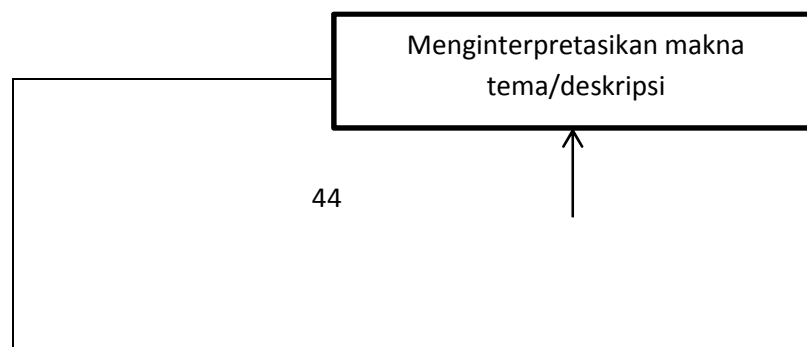
Menurut Creswell (2016:251) “Selama proses penelitian, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative documents*). Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, email)”. Selain mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, penulis juga mengumpulkan data melalui materi audio dan visual kualitatif (*qualitative audio and visual materials*). Data dapat berupa foto, objek seni, *videopate*, dan segala jenis suara/bunyi (Creswell, 2016:251).

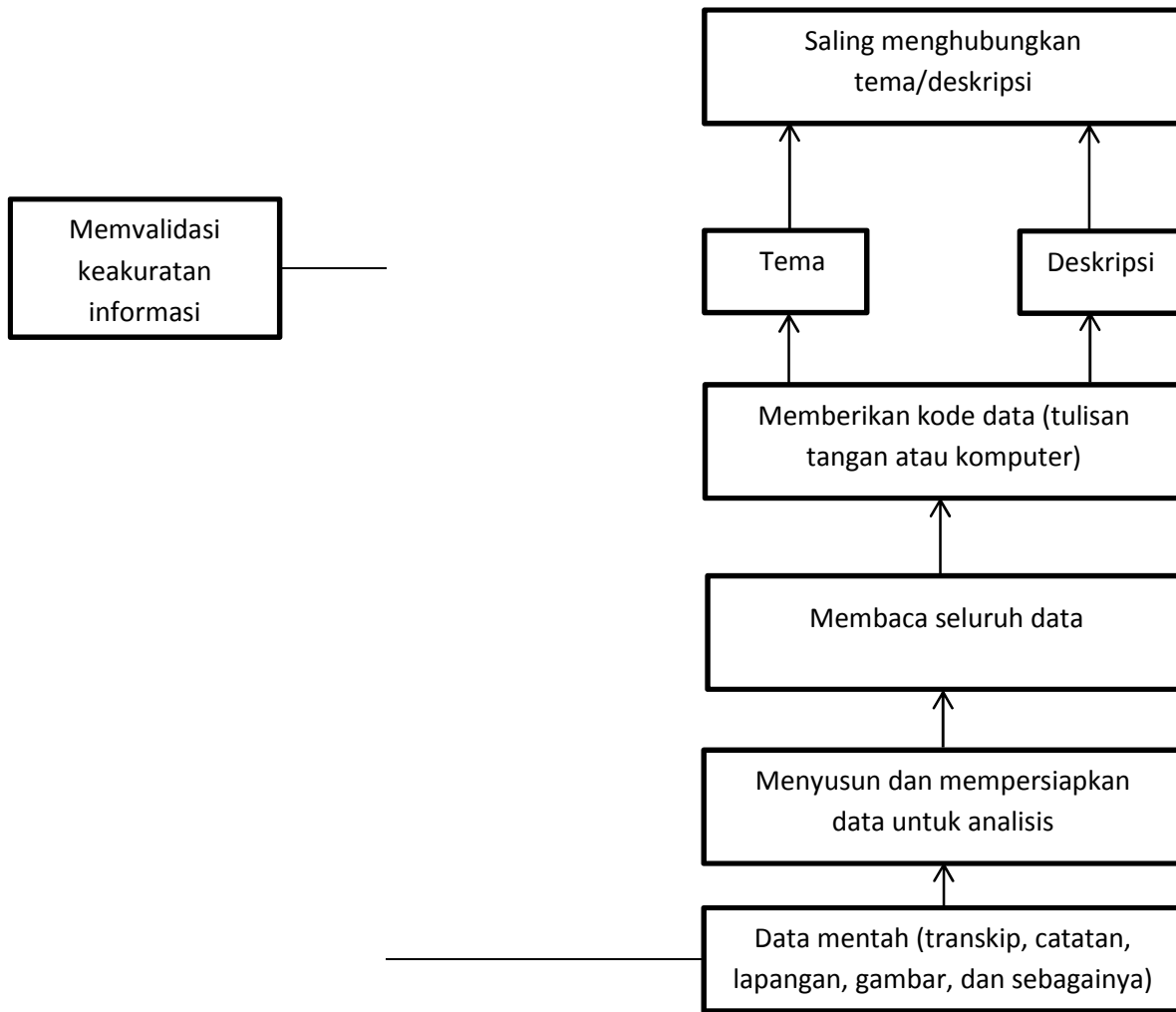
3. Materi audio dan visual kualitatif

Data ini bisa berupa foto, objek, seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (2016) analisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik hingga yang umum dengan berbagai level analisis yang berbeda.





Gambar 3.4.1 Skema Teknik Analisis Data Menurut Creswell

Creswell (2016) menyajikan beberapa langkah-langkah analisis sebagai berikut:

Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah 2. Membaca keseluruhan data langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana kesan dari kedalaman,

kredibilitas, dan penuturan informasi itu? Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

Langkah 3. Memulai *coding* semua data. Langkah ini melibatkan pengambilan data atau tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat (atau paragraf) atau gambar tersebut dalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus, yang seringkali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

Langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam setting (ranah) tertentu. Setelah mengidentifikasi tema selama proses *coding*, peneliti kualitatif dapat memanfaatkan lebih jauh tema ini untuk membuat analisis yang lebih kompleks.

Langkah 5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema.

Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data. Interpretasi berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya.

